

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM DI KABUPATEN MAJENE: PENDEKATAN *REALISTIC EVALUATION*

Hendrawan<sup>1\*</sup>, Farhanuddin<sup>2</sup>, Pahrudin M<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Politik, FISIPKUM, Universitas Sulawesi Barat. Indonesia

\*Korespondensi: [hendrawan@unsulbar.ac.id](mailto:hendrawan@unsulbar.ac.id)

\*\*\*

### Citation (APA):

Hendrawan, H., Farhanuddin, F., & Pahrudin M. (2026). Evaluasi Kebijakan Pengembangan UMKM di Kabupaten Majene: Pendekatan Realistic Evaluation. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 12(1), 75–89. <https://doi.org/10.33506/jn.v12i1.5672>

### Email Authors:

[hendrawan@unsulbar.ac.id](mailto:hendrawan@unsulbar.ac.id)  
[farhanuddin@unsulbar.ac.id](mailto:farhanuddin@unsulbar.ac.id)  
[pahrudinM@unsulbar.ac.id](mailto:pahrudinM@unsulbar.ac.id)

Submitted: 01 Mei, 2026  
Accepted: 19 Mei, 2026  
Published: 07 Juni, 2026

Copyright © 2026 Hendrawan,  
Farhanuddin, Pahrudin M

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Majene melalui pendekatan Realistic Evaluation dengan kerangka *Context–Mechanism–Outcome* (CMO). Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif dengan kerangka (*context–mechanism–outcome*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebutuhan kebijakan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Majene. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan yang relevan, termasuk jajaran Pemerintah Daerah, pelaku UMKM, akademisi, lembaga pembiayaan, serta komunitas masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 mampu memberikan dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi pelaku UMKM pada masa krisis dan pemulihan ekonomi. Namun, implementasi kebijakan masih didominasi pendekatan administratif dan *top-down* sehingga belum mampu menciptakan transformasi ekonomi UMKM secara berkelanjutan. Pada dimensi konteks, rendahnya literasi digital, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya kapasitas kelembagaan menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan. Pada dimensi mekanisme, belum optimalnya pendampingan, mentoring, dan kolaborasi lintas aktor menyebabkan kebijakan belum mampu membangun ekosistem pemberdayaan yang inovatif dan adaptif. Adapun pada dimensi outcome, kebijakan hanya menghasilkan dampak jangka pendek terhadap produktivitas dan stabilitas ekonomi tanpa meningkatkan daya saing dan kemandirian usaha secara signifikan.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan; UMKM; Realistic Evaluation; Kabupaten Majene.

### ABSTRACT

*This study aims to evaluate policies for the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Majene Regency using the Realistic Evaluation approach with the context–mechanism–outcome (CMO) framework. The research employed a qualitative descriptive-exploratory method to gain an in-depth understanding of policy needs and implementation dynamics in local MSME development. Data were collected through in-depth interviews with relevant stakeholders, including local government officials, MSME owners, academics, financial institutions, and community representatives. The findings indicate that Regent Regulation Number 11 of 2020 and Regent Regulation Number 33 of 2022 contributed positively to sustaining the economic resilience of MSMEs during periods of crisis and post-crisis recovery. However, policy implementation remains largely administrative and top-down, limiting its capacity to promote sustainable business transformation. In the context dimension, low digital literacy, limited market accessibility, and weak institutional capacity reduced policy effectiveness. In the mechanism dimension, insufficient business mentoring and limited multi-stakeholder collaboration constrained the development of an adaptive empowerment ecosystem. In the outcome dimension, the policies mainly generated short-term improvements in productivity and economic stability without significantly strengthening competitiveness and entrepreneurial self-reliance.*

**Keywords:** Policy Evaluation; MSMEs; Realistic Evaluation; Majene Regency

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat lokal. UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi instrumen vital dalam memperkuat basis ekonomi kerakyatan dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi (Sartyka, 2023). Namun demikian, pemberdayaan UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan, baik dari aspek permodalan, keterbatasan akses terhadap teknologi, maupun rendahnya kemampuan manajerial pelaku usaha (Handrina, 2023). Dalam situasi perekonomian yang kian dinamis dan kompleks, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi sekaligus sarana untuk memperkuat inklusi sosial. (Heri Hakim, 2023).

UMKM memberikan asa cukup besar dalam rangka menekan dampak dari banyaknya pengangguran. Proses produksi sampai dengan tahap distribusi UMKM membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak, UMKM memberikan kontribusi besar berupa penyerapan tenaga kerja yang cukup signifikan, khususnya pada sektor ekonomi informal (Santoso & Jati, 2020). Dengan potensi ini belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat terutama mereka yang belum terbiasa dengan teknologi sehingga perlu penerapan ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk nyata dari ekonomi kerakyatan yaitu berupa dukungan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga hasil produksi dari UMKM tidak hanya dipasarkan di pasar lokal tetapi juga diluar daerah dan semakin berkembang (Husada Putra, 2016). selain pendekatan ekonomi kerakyatan butuh perspektif lain yaitu perspektif sosiologi agama, penerimaan masyarakat terhadap digitalisasi usaha berjalan selaras dengan nilai-nilai sosial dan keagamaan yang dianut. Digitalisasi tidak menghilangkan nilai-nilai lokal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan kepada sesama, melainkan justru memperkuat praktik bisnis yang beretika dan profesional (Leuwol et al., 2025). Sehingga masyarakat punya persepsi yang paten dalam memaknai dinamika UMKM di Kecamatan Banggae Timur. Persepsi merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu objek dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan dirinya dan lingkungannya (Khalida & Sofyan Sjaf, 2021). Diperlukan juga peningkatan penggunaan media sosial dan internet telah mengubah perilaku pelanggan. Konsumen cenderung mencari layanan atau produk secara daring dan mempercayai bisnis yang memiliki keberadaan konsisten di media sosial maupun media daring lainnya (Aqmal & Mattoasi, 2024).

Di sisi lain, pemerintah memiliki peranan krusial dalam memastikan keberlanjutan pemberdayaan UMKM. Hal ini diwujudkan melalui kebijakan, program, serta evaluasi kinerja pembangunan ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi kebijakan menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana capaian program pemberdayaan UMKM sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang perlu diperbaiki (Cendikia, 2021). Dengan demikian, arah kebijakan dapat terus disempurnakan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan UMKM yang dinamis.

Selain itu, pemerintah daerah memposisikan pembinaan UMKM sebagai salah satu prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rachman, 2024). Dalam kerangka ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai

regulator dan katalisator dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif (Rinaldi et al., 2022). Peran optimal pemerintah diharapkan mampu mempercepat proses transformasi UMKM menuju unit usaha yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing. Secara makro, pengembangan UMKM yang kuat dan berkelanjutan di tingkat daerah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pertumbuhan UMKM yang sehat akan memperkuat struktur ekonomi daerah, menciptakan stabilitas, serta meningkatkan ketahanan ekonomi nasional (Latifah et al., 2024); (Anugrah et al., 2021). Oleh karena itu, upaya penguatan UMKM tidak hanya dipandang sebagai strategi pembangunan lokal, tetapi juga sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan peluang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menganalisis strategi pemberdayaan UMKM dengan menekankan peran kebijakan pemerintah serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas program pemberdayaan UMKM sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung keberlanjutan sektor ini.

Evaluasi kebijakan penting dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan dengan melihat seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Prasetyo, 2024). Evaluasi kebijakan publik sejatinya tidak hanya diproses akhir, melainkan juga terdapat dalam seluruh proses dari formulasi dan implementasi. Korelasi dari setiap tahapan menjadi inti dari fungsionalisasi dari evaluasi kebijakan dalam mengamati dan menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan (Syaifullah, 2025) serta evaluasi juga ditujukan untuk menilai sejauh mana efektifitas suatu kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauhmana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan (Suyono, Oksep Adhayanto, 2024).

Penelitian ini memiliki kebaruan pada penerapan pendekatan *Realistic Evaluation* yang dikembangkan oleh Ray Pawson dan Nick Tilley (1997) untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah Kabupaten Majene dalam pengembangan UMKM. Berbeda dengan penelitian (Prasetyo 2024). Dalam penelitiannya *Tuka-Tuku Purbalingga* menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan kerangka evaluasi William N. Dunn yang bersifat deskriptif, menilai keberhasilan program berdasarkan indikator efektivitas dan efisiensi tanpa menelusuri mekanisme penyebabnya (Mahardhika et al 2024). Mengevaluasi kebijakan UMKM di Kabupaten Badung tanpa menelusuri mekanisme kebijakan secara mendalam, penelitian ini menekankan hubungan antara *konteks (C)*, *mekanisme (M)*, dan *outcome (O)* dalam implementasi kebijakan daerah. Berbeda dari kedua studi tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada evaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Majene dalam pengembangan UMKM dengan memanfaatkan kerangka *Realistic Evaluation*. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap interaksi antara konteks sosial-ekonomi daerah, mekanisme kebijakan yang dijalankan, serta hasil yang muncul di tingkat pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengayaan teori evaluasi kebijakan publik, tetapi juga menghasilkan model evaluasi berbasis bukti (*evidence-based evaluation model*) yang dapat menjadi rujukan dalam perumusan strategi pengembangan UMKM di tingkat daerah lain.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif dengan kerangka **C-M-O** (*context-mechanism-outcome*) untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kebutuhan kebijakan bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Majene. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pemangku kepentingan yang relevan, termasuk jajaran Pemerintah Daerah, pelaku UMKM, akademisi, lembaga pembiayaan, serta komunitas masyarakat (Pauzy & Sundari, 2025). Sebagaimana ditawarkan oleh kerangka Realistic Evaluation (Tilley, 1999). Evaluasi realistik (*realist evaluation*) menawarkan cara yang sangat berharga untuk memahami bagaimana suatu intervensi bekerja, serta bagaimana intervensi tersebut dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan konteks lokal (Haynes et al., 2021).

Pendekatan *realistic evaluation* dipandang relevan karena memungkinkan peneliti menelaah bagaimana dan mengapa suatu kebijakan bekerja (atau tidak bekerja) dalam kondisi sosial tertentu. Dengan demikian, analisis penelitian tidak hanya menilai keberhasilan atau kegagalan program, tetapi juga mengungkap hubungan antara kebijakan pemerintah daerah, dinamika sosial masyarakat, serta hasil yang dicapai oleh pelaku UMKM di Majene.

Subjek penelitian terdiri atas aktor-aktor kunci yang terlibat dalam pengembangan UMKM, meliputi pemerintah daerah (Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan), pelaku UMKM, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak swasta yang menjadi mitra strategis. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, dipadukan dengan *snowball sampling* untuk menjangkau aktor-aktor yang relevan dengan implementasi kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada evaluasi implementasi dua Peraturan Bupati terkait pengembangan UMKM di Kabupaten Majene sebagai objek evaluasi utama. Berbagai program pengembangan UMKM yang dilaksanakan selama periode 2020–2025 diposisikan sebagai konteks implementasi kebijakan dan sumber data empiris untuk memahami mekanisme serta outcome kebijakan. Dengan demikian, penelitian tidak mengevaluasi seluruh program UMKM secara terpisah, melainkan menelaah bagaimana kebijakan daerah tersebut bekerja dalam mendorong pengembangan UMKM di Kabupaten Majene. Oleh karena itu, penelitian tidak diarahkan pada evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pengembangan UMKM yang dilaksanakan pemerintah daerah, melainkan pada analisis terhadap efektivitas implementasi kebijakan yang termuat dalam dua Peraturan Bupati tersebut. Dalam kerangka ini, program-program pengembangan UMKM dipahami sebagai manifestasi implementatif dari kebijakan yang dianalisis, sehingga keberhasilannya dipandang sebagai bagian dari outcome kebijakan, bukan sebagai objek evaluasi yang berdiri sendiri.

Konsep *realistic evaluation* pertama kali diperkenalkan oleh Ray Pawson dan Nick Tilley pada tahun 1997 melalui buku "**Realistic Evaluation**" (Tilley, 1999) sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan ilmiah eksperimental. Pendekatan ini berlandaskan teori dan menggunakan perspektif realisme untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan suatu program. Salah satu ciri utamanya adalah penggunaan konfigurasi **C-M-O** (*context-mechanism-outcome*) yang berpijak pada prinsip filsafat realisme, yakni bahwa realitas objektif berada di luar pengamatan langsung manusia, namun menunjukkan pola kejadian berulang dalam konteks tertentu (Mukumbang et al., 2023). Maka diperlukan pemahaman

terhadap hubungan yang kompleks antara mekanisme-mekanisme tersebut dengan pengaruh konteks terhadap cara kerjanya dan hasil yang ditimbulkannya. Pawson dan Tilley merumuskannya sebagai: *konteks (C) + mekanisme (M) = outcome (O)* (Ilott et al., 2006).

Berbeda dari positivisme murni yang menekankan pengukuran objektif, *realist evaluation* lebih memusatkan perhatian pada mekanisme yang muncul dari suatu intervensi atau program dalam konteks spesifik. Sebagai pendekatan yang digerakkan oleh teori, RE bertujuan memahami bagaimana dan mengapa sebuah program menghasilkan hasil tertentu di satu situasi tetapi berbeda di situasi lain. Metode ini sangat relevan untuk intervensi sosial, di mana capaian dipengaruhi oleh interaksi para pemangku kepentingan yang sarat norma sosial dan budaya. Dengan berlandaskan pada premis bahwa konteks (C) memicu mekanisme (M) untuk menghasilkan keluaran (O), evaluasi realis tidak hanya melihat input dan output, tetapi juga menelusuri proses konversi di dalam *black box* yang mengubah masukan menjadi keluaran. Proses ini mensyaratkan kondisi tertentu agar mekanisme sebab-akibat dapat terpicu dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Hubungan ini kemudian dirumuskan dalam bentuk konfigurasi CMO (Ranmuthugala et al., 2011) berikut table yang menggambarkan konsep CMO menganalisis suatu kebijakan dalam pengembangan UMKM:

**Tabel I. Konsep CMO**

Komponen	Pengertian/defenisi	Pertanyaan kunci
<i>Context (C)</i>	Kondisi, lingkungan, atau situasi yang memengaruhi berjalannya mekanisme. Bisa meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, atau kebijakan.	Dalam kondisi seperti apa program dijalankan?
<i>Mechanism (M)</i>	Proses, sumber daya, atau interaksi yang memicu terjadinya perubahan perilaku atau hasil.	Apa yang membuat program ini bekerja?
<i>Outcome (O)</i>	Perubahan atau hasil yang terjadi akibat interaksi antara mekanisme dan konteks.	Apa hasil yang muncul, dan bagaimana variasinya ?

**Sumber :** Olahan penulis 2026

Kerangka *context-mechanism-outcome* (CMO) merupakan salah satu pendekatan analisis yang digunakan untuk memahami bagaimana sebuah program kebijakan bekerja dalam suatu lingkungan tertentu. Pendekatan ini menekankan keterkaitan antara konteks, mekanisme, dan hasil yang dihasilkan dari suatu intervensi kebijakan.

Pertama, *context (C)* merujuk pada kondisi, lingkungan, atau situasi yang memengaruhi berjalannya suatu mekanisme program. Konteks dapat mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, maupun kebijakan yang ada di wilayah tertentu. Pertanyaan utama yang diajukan pada tahap ini adalah “*dalam kondisi seperti apa program dijalankan?*”. Pemahaman terhadap konteks sangat penting karena program yang sama dapat menghasilkan hasil berbeda jika diterapkan dalam lingkungan sosial atau ekonomi yang berlainan.

Kedua, *mechanism (M)* dipahami sebagai proses, sumber daya, atau interaksi yang memicu terjadinya perubahan perilaku maupun hasil tertentu. Mekanisme berfungsi sebagai penggerak utama yang menjelaskan *mengapa* suatu program dapat berjalan efektif dalam konteks tertentu. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah “*apa yang membuat program ini bekerja?*”. Dengan demikian, mekanisme tidak sekadar

merujuk pada input program, tetapi lebih pada bagaimana faktor-faktor tertentu memicu respons dari aktor yang terlibat.

Ketiga, *outcome* (O) merupakan perubahan atau hasil yang muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara mekanisme dan konteks. Outcome dapat berbentuk peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, maupun dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Pertanyaan penting yang diajukan dalam tahap ini adalah “apa hasil yang muncul, dan bagaimana variasinya?”. Variasi hasil sangat mungkin terjadi karena perbedaan kondisi konteks dan mekanisme yang bekerja.

Dengan demikian, kerangka CMO memberikan cara pandang yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi suatu program atau kebijakan khususnya dalam konteks UMKM yang ada di Kabupaten Majene. Tidak hanya sekedar menilai hasil akhir, pendekatan ini menelusuri hubungan kausal antara konteks, mekanisme, dan *outcome* sehingga dapat menjelaskan mengapa suatu kebijakan berhasil di satu tempat namun kurang efektif di tempat lain. Evaluasi realistik (*realist evaluation*) merupakan suatu metodologi yang berupaya menjawab pertanyaan: “apa yang bekerja, untuk siapa, dalam kondisi apa, dan bagaimana caranya?”. Dalam pendekatan ini, teori program (*programme theories*) dikembangkan dan diuji berdasarkan bukti yang tersedia (Jagosh et al., 2022). Evaluasi realistik (*realist evaluation*) semakin populer sebagai sebuah metodologi evaluasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkap mekanisme-mekanisme yang menyebabkan terjadinya hasil (*outcomes*) tertentu setelah suatu intervensi, serta kondisi kontekstual yang memungkinkan hasil tersebut muncul (Renmans & Castellano Pleguezuelo, 2023). Dalam penelitian ini kebijakan pemerintah yang akan di evaluasi adalah Peraturan Bupati Majene Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Peralatan Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisis bahwa penulis membagi evaluasi kebijakan ini dalam tiga bagian antara lain *konteks*, merujuk pada kondisi, lingkungan Mekanisme, sebagai proses, sumber daya, atau interaksi yang memicu terjadinya perubahan perilaku maupun hasil dan *outcome* berbicara tentang perubahan atau hasil yang muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antara mekanisme dan konteks berikut pembagian dari tiga tahapan tersebut :

**Context (Konteks Kebijakan).** Konteks lahirnya Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial ekonomi yang dipicu oleh pandemi COVID-19. Pada masa tersebut, struktur ekonomi lokal Kabupaten Majene yang didominasi oleh sektor informal dan usaha mikro menghadapi tekanan berat akibat penurunan permintaan, gangguan rantai pasok, dan terbatasnya mobilitas masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengalami stagnasi bahkan penutupan usaha sementara karena menurunnya daya beli konsumen dan terhambatnya distribusi bahan baku. Dalam situasi krisis tersebut, pemerintah daerah melalui Perbup No. 11 Tahun 2020 berupaya memberikan intervensi kebijakan berbasis stimulus ekonomi dengan menyalurkan bantuan penguatan modal usaha yang bersumber dari APBD. Intervensi ini dirancang sebagai langkah cepat (*quick response*) untuk mencegah keruntuhan ekonomi lokal serta mempertahankan lapangan kerja masyarakat berbasis usaha mikro.

Selanjutnya, setelah fase darurat berlalu, arah kebijakan bergeser menuju pemulihan ekonomi (*recovery phase*), yang diwujudkan melalui Peraturan Bupati Majene Nomor 33 Tahun 2022 tentang

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Peralatan bagi Pelaku UMKM. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang berorientasi pada bantuan tunai, kebijakan ini menitikberatkan pada pemberian bantuan non-tunai berupa peralatan produksi sebagai bentuk peningkatan kapasitas produktif. Pendekatan ini merefleksikan perubahan paradigma kebijakan dari sekadar pemulihan menuju penguatan daya saing ekonomi lokal dengan menekankan peningkatan kualitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha masyarakat.

Kedua kebijakan tersebut membentuk suatu kontinum konteks kebijakan yang saling berkelindan: dari tanggap darurat menuju penguatan kapasitas ekonomi daerah. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kondisi sosial ekonomi lokal Majene yang unik. Mayoritas pelaku UMKM di wilayah ini masih beroperasi secara tradisional dengan keterbatasan pada akses teknologi, modal lanjutan, serta literasi digital. Riset lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum terintegrasi dalam ekosistem digital dan masih mengandalkan pemasaran konvensional berbasis komunitas lokal.

Di sisi lain, tingkat pendidikan dan kapasitas manajerial pelaku usaha relatif rendah, sehingga adopsi kebijakan yang menuntut inovasi dan modernisasi usaha menjadi tidak optimal. Dalam konteks ini, kebijakan daerah menghadapi tantangan berupa kesiapan struktural dan kultural. Secara struktural, dukungan kelembagaan dan pendampingan pasca-bantuan masih terbatas, sementara secara kultural, masih terdapat kecenderungan pelaku usaha memaknai bantuan pemerintah sebagai bentuk karitas, bukan instrumen pemberdayaan jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun secara normatif Perbup No. 11 Tahun 2020 dan Perbup No. 33 Tahun 2022 telah menunjukkan kesinambungan arah kebijakan, namun secara kontekstual, daya serap dan efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh kesiapan aktor lokal, kapasitas kelembagaan, dan adaptabilitas pelaku UMKM terhadap perubahan lingkungan ekonomi.

Dengan demikian, konteks kebijakan dalam dua regulasi ini dapat dipahami bukan hanya sebagai latar administratif, tetapi juga sebagai cerminan respons adaptif pemerintah daerah terhadap dinamika ekonomi lokal dan kondisi sosial masyarakat Majene. Evaluasi konteks ini penting karena menentukan sejauh mana kebijakan yang dirancang benar-benar berakar pada kebutuhan riil pelaku UMKM serta mampu menjembatani fase pemulihan menuju kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas UKM Majene menerangkan bahwa pemerintah daerah juga mendorong pendekatan kolaboratif melalui sinergi antar-organisasi perangkat daerah, lembaga pendidikan, serta komunitas masyarakat dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Pendekatan ini menjadi penting karena pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor untuk menciptakan keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, berbagai program yang dijalankan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk implementasi nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi sekaligus membangun fondasi kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Selain dari Perbup No. 11 Tahun 2020 dan Perbup No. 33 Tahun 2022 ada juga beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene sebagai berikut :

**Tabel II.** Program Bantuan Pemerintah Kabupaten Majene & Kegiatan Terkait UMKM di Majene tahun 2020-2025

Program / Kegiatan	Penyelenggara
--------------------	---------------

Penguatan modal usaha untuk UMKM yang Terdampak Covid-19 (2020)	Pemkab Majene, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Majene
Bimtek (bimbingan teknis) peningkatan kapasitas pelaku umkm & pertanian (2023)	Pemerintah Kabupaten Majene & pihak terkait (Balai Standar Instrumen Pertanian Sulbar dan Dinas terkait)
Bantuan alsintan – traktor roda 4 (2025)	Pemkab Majene melalui Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Majene dengan dukungan APBN Pusat
Penciptaan / legalisasi badan hukum koperasi desa/kelurahan “KDKMP” (2025)	Pemerintah Kabupaten Majene & Kanwil Kemenkum-HAM Sulawesi Barat
Pengembangan UMKM Lokal Desa Bonde – kolaborasi dengan Universitas Terbuka (PKM Desa Binaan) (2025)	Universitas Terbuka Majene bekerjasama dengan Pemerintah Desa Bonde dan BUMDes Olang Mesa
Inisiatif pangan lokal & festival pangan lokal (2025)	Pemkab Majene, Dinas Ketahanan Pangan Majene

**Sumber:** Dinas UKM Kab. Majene 2026

Berdasarkan fokus penelitian mengenai kebijakan pengembangan UMKM, maka program yang memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan kapasitas, legalitas, pemasaran, dan pemberdayaan pelaku UMKM menjadi prioritas dalam pembahasan. Oleh karena itu, program bantuan alsintan traktor roda empat serta inisiatif festival pangan lokal tidak dijadikan sebagai fokus utama analisis karena keterkaitannya terhadap pengembangan UMKM bersifat tidak langsung dan lebih berorientasi pada sektor pendukung ekonomi daerah. Dengan demikian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada program-program yang secara eksplisit ditujukan untuk pengembangan UMKM, seperti penguatan modal usaha, bimbingan teknis peningkatan kapasitas pelaku UMKM, legalisasi badan hukum koperasi desa/kelurahan, serta kolaborasi pengembangan UMKM lokal bersama perguruan tinggi.

Pemerintah Kabupaten Majene terus berupaya memperkuat sektor UMKM melalui berbagai program strategis lintas sektor. Sejak tahun 2020, pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan modal usaha bagi 454 pelaku UMKM terdampak COVID-19 di Kecamatan Banggae dan Banggae Timur sebagai langkah pemulihan ekonomi lokal. Upaya ini dilanjutkan dengan bimbingan teknis peningkatan kapasitas UMKM dan petani yang bekerja sama dengan Balai Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat, serta penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) pada tahun 2025 untuk meningkatkan produktivitas dan rantai nilai usaha.

Selain itu, Pemkab Majene bersama Kemenkum-HAM Sulawesi Barat menjalankan program legalisasi koperasi desa/kelurahan (KDKMP) untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi antara Universitas Terbuka Majene, Pemerintah Desa Bonde, dan BUMDes Olang Mesa juga dilakukan melalui program pengembangan UMKM lokal berbasis potensi desa. Dukungan lain diwujudkan melalui Festival Pangan Lokal, yang mendorong promosi, inovasi, dan kemandirian ekonomi berbasis sumber daya lokal. Berbagai program tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Majene dalam memperkuat kapasitas, inovasi, dan daya saing UMKM, meski keberlanjutannya tetap memerlukan koordinasi dan evaluasi lintas sektor secara berkelanjutan.

**Mechanism (Mekanisme Implementasi Kebijakan).** Mekanisme implementasi Peraturan Bupati Majene Nomor 11 Tahun 2020 dirancang dalam kerangka kebijakan darurat untuk menahan laju kontraksi ekonomi lokal akibat pandemi COVID-19. Mekanisme tersebut diwujudkan melalui penyaluran stimulus keuangan langsung (direct financial transfer) kepada pelaku UMKM yang terdampak. Proses implementasi

melibatkan tahapan administratif yang mencakup pendataan calon penerima, verifikasi kelayakan, serta penyaluran bantuan melalui perangkat daerah yang berwenang, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Majene. Instrumen kebijakan yang digunakan bersifat fiskal dan administratif, dengan orientasi jangka pendek, yakni menyelamatkan usaha mikro dari potensi kebangkrutan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah krisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ini masih bersifat *top-down* dan belum dilengkapi dengan sistem pendampingan teknis, pelatihan kewirausahaan, atau mekanisme monitoring penggunaan dana secara berkelanjutan. Akibatnya, efektivitas kebijakan menjadi terbatas. Sebagian penerima bantuan diketahui menggunakan dana stimulus untuk kebutuhan konsumtif rumah tangga, bukan sebagai tambahan modal produktif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desain kebijakan sudah tepat sebagai intervensi tanggap darurat, namun dalam praktiknya belum mampu menginternalisasi perilaku kewirausahaan yang produktif di kalangan penerima bantuan. Sebaliknya, Peraturan Bupati Majene Nomor 33 Tahun 2022 merepresentasikan fase transisi kebijakan menuju penguatan ekonomi produktif. Mekanisme implementasinya menggunakan pendekatan bantuan non-tunai berupa peralatan usaha, seperti mesin pengolahan, alat produksi, atau peralatan pendukung lainnya. Tujuan dari mekanisme ini adalah memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas daya saing pelaku usaha di tingkat lokal. Prosedur implementasi tetap mengandalkan seleksi administratif dan verifikasi lapangan, namun dengan fokus pada kesesuaian jenis bantuan dengan kebutuhan usaha penerima.

Secara teoritik, perubahan mekanisme dari bantuan tunai ke bantuan peralatan mencerminkan pergeseran instrumen kebijakan dari yang bersifat *charity-based* menuju *capacity-based*. Akan tetapi, temuan penelitian di lapangan memperlihatkan bahwa mekanisme pelaksanaan masih didominasi oleh logika administratif dan belum diimbangi dengan penciptaan mekanisme sosial (*social mechanism*) yang dapat memicu inovasi, kolaborasi, dan pembelajaran antar pelaku UMKM. Dalam konteks Kabupaten Majene, di mana ekosistem UMKM masih tersebar dalam skala kecil dan belum terintegrasi secara digital, mekanisme kebijakan yang tidak menyertakan *coaching*, *mentoring*, atau *linkage* dengan lembaga keuangan, akademisi, dan sektor swasta menyebabkan potensi keberlanjutan program menjadi terbatas.

Ketiadaan sinergi lintas aktor seperti keterlibatan akademisi dalam pendampingan manajerial, sektor swasta dalam membuka akses pasar, serta komunitas lokal dalam memperkuat jejaring sosial ekonomi menyebabkan implementasi kebijakan lebih menekankan output administratif (jumlah bantuan tersalurkan, jumlah penerima) dibandingkan outcome transformasional (peningkatan kapasitas inovatif, daya saing, dan kemandirian usaha). Dengan demikian, meskipun terdapat indikasi perbaikan arah kebijakan dari pendekatan bantuan ke arah pemberdayaan, namun mekanisme implementasi kedua peraturan tersebut masih menghadapi defisit kelembagaan dan sosial, yaitu belum terbentuknya sistem yang mampu menghubungkan kebijakan publik dengan dinamika riil pengembangan UMKM di tingkat lokal.

Dengan perspektif *Realistic Evaluation*, mekanisme kebijakan di Kabupaten Majene menunjukkan bahwa intervensi kebijakan belum menciptakan konteks pembelajaran sosial yang adaptif. Pemerintah telah berhasil menyalurkan sumber daya, namun belum sepenuhnya menciptakan rantai nilai kebijakan yang mengubah perilaku ekonomi pelaku UMKM secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pada dimensi mekanisme sosial dan kolaboratif dalam kebijakan daerah agar proses implementasi tidak

berhenti pada distribusi bantuan, melainkan mampu menghasilkan perubahan perilaku dan kapasitas yang lebih sistemik di kalangan pelaku UMKM.

**Outcome (Hasil dan Dampak Kebijakan).** Hasil empiris menunjukkan bahwa Perbup No. 11 Tahun 2020 memiliki dampak positif dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pelaku UMKM selama masa pandemi. Stimulus modal yang diberikan berfungsi sebagai instrumen protektif yang mencegah kebangkrutan massal, namun sifatnya sementara dan belum mendorong kemandirian usaha. Sebagian besar penerima bantuan tidak mengalami peningkatan signifikan dalam produktivitas setelah program berakhir, karena tidak ada tindak lanjut berupa pelatihan yang bersifat *continue* atau akses pemasaran. Sementara itu, Perbup No. 33 Tahun 2022 menghasilkan peningkatan kapasitas produksi bagi sebagian pelaku usaha yang menerima bantuan peralatan. Akan tetapi, tanpa dukungan pada aspek pemasaran dan digitalisasi, dampak kebijakan tersebut masih terbatas. Produk UMKM yang dihasilkan meningkat secara kuantitas, tetapi belum mampu menembus pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberdayaan masih berfokus pada *input* dan *output*, belum sepenuhnya berorientasi pada *outcome* ekonomi yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, tetapi belum menciptakan transformasi struktural dalam ekosistem UMKM di Kabupaten Majene. Ketiadaan integrasi antar-kebijakan membuat hasil kedua program berjalan sendiri-sendiri tanpa kesinambungan antara bantuan modal dan peningkatan kapasitas produksi.

Hasil analisis dengan kerangka *Context Mechanism Outcome* dapat disintesis sebagai berikut: konteks kebijakan di Majene menunjukkan kesiapan politik dan fiskal, namun masih terbatas secara kelembagaan dan sosial. Mekanisme kebijakan yang diterapkan lebih menekankan aspek administratif dan penyaluran, belum pada proses pemberdayaan yang menumbuhkan perubahan perilaku usaha. Outcome kebijakan relatif berhasil menahan guncangan ekonomi, tetapi belum menghasilkan kemandirian dan daya saing berkelanjutan bagi pelaku UMKM.

Dalam perspektif *Realistic Evaluation*, efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kesesuaian antara konteks lokal, mekanisme implementasi, dan hasil yang diharapkan. Pada kasus Majene, hubungan antara ketiga elemen tersebut belum sinkron, sehingga kebijakan masih berfungsi sebagai intervensi jangka pendek, bukan katalisator perubahan jangka panjang.

Berdasarkan temuan di atas, diperlukan perumusan kebijakan lanjutan yang mengintegrasikan hasil dari kedua Perbup tersebut dalam kerangka pemberdayaan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme pendampingan dan pelatihan berbasis digital, memperkuat kolaborasi dengan aktor lain (akademisi, komunitas, swasta, dan media), serta mengadopsi pendekatan Nano Helix untuk memperluas dampak kebijakan terhadap pemasaran UMKM. Pendekatan ini akan memungkinkan pemerintah untuk beralih dari paradigma *distributif* menuju *transformasional*, di mana kebijakan bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga menumbuhkan daya saing dan keberlanjutan usaha lokal. Berikut tabel evaluasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan CMO :

**Tabel III.** Evaluasi Kebijakan Menggunakan Pendekatan CMO

Aspek CMO	Perbup No. 11 Tahun 2020(Stimulus Modal Usaha di Masa Pandemi)	Perbup No. 33 Tahun 2022(Bantuan Peralatan Usaha pada Fase Pemulihan)	Kelemahan Implementasi
<i>Context</i>	Lahir pada masa krisis akibat pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan UMKM dari penurunan aktivitas produksi dan permintaan. Fokus kebijakan pada stabilisasi ekonomi lokal.	Diterbitkan pada fase pemulihan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing pelaku UMKM.	Kondisi sosial-ekonomi UMKM di Majene masih tradisional, rendah literasi digital dan akses pasar; kesiapan aktor lokal masih lemah terhadap modernisasi usaha.
<i>Mechanism</i>	Penyaluran stimulus tunai langsung melalui pendataan dan verifikasi administratif tanpa pendampingan lanjutan. Sebagian penerima memakai dana untuk kebutuhan konsumtif.	Bantuan non-tunai berupa peralatan usaha, melalui seleksi dan verifikasi administratif. Belum ada mekanisme sosial seperti mentoring atau kolaborasi antar pelaku usaha.	Mekanisme bersifat administratif dan top-down; belum membangun ekosistem pendampingan, inovasi, dan sinergi lintas aktor (pemerintah–akademisi–swasta–komunitas).
<i>Outcome</i>	Menyelamatkan pelaku usaha mikro secara jangka pendek, tetapi tidak meningkatkan kemandirian usaha.	Meningkatkan produktivitas sebagian pelaku usaha, namun belum berdampak signifikan terhadap daya saing dan keberlanjutan usaha	Outcome transformasional belum tercapai; kebijakan belum mendorong perubahan perilaku ekonomi dan inovasi UMKM secara berkelanjutan.

**Sumber:** Olahan Penulis 2026

Berdasarkan analisis menggunakan pendekatan *context–mechanism–outcome* (CMO), implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Majene melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah telah berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan aktivitas usaha mikro pada fase krisis dan pemulihan ekonomi. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan masih cenderung bersifat jangka pendek dan administratif karena orientasi implementasi lebih difokuskan pada distribusi bantuan dibandingkan penguatan kapasitas usaha secara struktural dan berkelanjutan.

Pada dimensi *context*, karakteristik UMKM yang masih didominasi pola usaha tradisional, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan akses pasar menjadi faktor kontekstual yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya, pada dimensi *mechanism*, pola implementasi kebijakan yang bersifat *top-down* dan minim pendampingan menyebabkan intervensi kebijakan belum mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan yang kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme kebijakan belum sepenuhnya mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas dalam pengembangan UMKM. Adapun pada dimensi *outcome*, kebijakan bantuan modal usaha dan bantuan peralatan usaha memang memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi dan peningkatan produktivitas sebagian pelaku UMKM. Namun, dampak tersebut belum secara signifikan menghasilkan transformasi terhadap peningkatan daya saing, kemandirian usaha, maupun keberlanjutan ekonomi UMKM dalam jangka panjang. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa pengembangan UMKM memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih integratif dan berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan literasi digital, perluasan akses pasar, serta penguatan kolaborasi lintas aktor guna mewujudkan transformasi ekonomi lokal yang lebih adaptif dan berdaya saing.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Majene melalui Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus modal usaha dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang bantuan peralatan usaha telah menunjukkan peran strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pada masa krisis dan pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Melalui pendekatan *Realistic Evaluation* dengan kerangka *context-mechanism-outcome* (CMO), penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi regulasi, tetapi juga oleh kesesuaian antara konteks sosial-ekonomi lokal, mekanisme implementasi kebijakan, serta outcome yang dihasilkan bagi pelaku UMKM.

Pada dimensi *context*, penelitian menemukan bahwa struktur UMKM di Kabupaten Majene masih didominasi oleh pola usaha tradisional dengan tingkat literasi digital, kapasitas manajerial, dan akses pasar yang relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sosial dan kelembagaan masyarakat belum sepenuhnya adaptif terhadap tuntutan modernisasi ekonomi dan transformasi usaha berbasis digital. Selain itu, keterbatasan dukungan kelembagaan dan rendahnya integrasi antaraktor pembangunan menyebabkan implementasi kebijakan belum mampu berjalan secara optimal dalam membangun ekosistem usaha yang kompetitif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, pada dimensi *mechanism*, implementasi kebijakan cenderung berorientasi pada pendekatan administratif dan distributif melalui penyaluran bantuan modal maupun bantuan peralatan usaha. Meskipun mekanisme tersebut efektif sebagai instrumen mitigasi ekonomi jangka pendek, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan belum disertai dengan sistem pendampingan, penguatan kapasitas kewirausahaan, mentoring, serta pengembangan jejaring kolaboratif yang memadai. Akibatnya, mekanisme kebijakan belum mampu menciptakan proses pembelajaran sosial dan transformasi perilaku ekonomi pelaku UMKM secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya defisit mekanisme sosial dalam implementasi kebijakan, di mana hubungan antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka pemberdayaan UMKM.

Pada dimensi *outcome*, kebijakan pemerintah daerah terbukti memberikan kontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas produksi sebagian pelaku UMKM. Namun demikian, outcome yang dihasilkan masih bersifat parsial dan belum mampu mendorong transformasi struktural dalam ekosistem UMKM di Kabupaten Majene. Peningkatan produktivitas yang terjadi belum diikuti oleh penguatan daya saing, perluasan akses pasar, inovasi usaha, maupun peningkatan kemandirian ekonomi pelaku UMKM secara signifikan. Dengan demikian, outcome kebijakan masih lebih menonjol pada aspek stabilisasi ekonomi dibandingkan penciptaan keberlanjutan ekonomi lokal berbasis inovasi dan daya saing.

Secara teoritik, penelitian ini menegaskan relevansi pendekatan *Realistic Evaluation* dalam menganalisis efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam konteks pengembangan UMKM daerah. Pendekatan CMO memungkinkan identifikasi hubungan kausal antara *konteks*, *mechanism*, dan *outcome* sehingga evaluasi kebijakan tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga pada dinamika sosial yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Majene masih berada pada

paradigma distributif dan belum sepenuhnya bergerak menuju paradigma transformasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan pengembangan UMKM yang lebih integratif, partisipatif, dan berorientasi jangka panjang melalui penguatan literasi digital, pengembangan kapasitas kewirausahaan, pendampingan berbasis komunitas, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, A. P., Halim, A., & Mappigau, E. (2021). *Analisis pengaruh usaha mikro , kecil , menengah ( UMKM ) terhadap pertumbuhan ekonomi Analysis of the influence of micro , small , medium enterprises ( MSMEs ) on economic growth*. 23(4), 828–835.
- Aqmal, I. U., & Mattoasi. (2024). Pemasaran Konten untuk Meningkatkan Kesadaran Merek UMKM Desa Botutonuo. *SOSIOLOGI: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 120–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.37905/sjppm.v1i3.79>
- Cendikia, Gi. W. W. (2021). *PUBLIK, EVALUASI KEBIJAKAN Dan, (Studi Evaluasi Program Kegiatan Revitalisasi Pasar Modren di Dinas Perdagangan Meranti), Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kepulauan [PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU]*. <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/8223>
- Handrina, E. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN UKM EKONOMI MASYARAKAT DAN DAMPAK SOSIOLOGIS (Studi Kec. Kamang Magek, Kab Agam). *Jurnal Unes Law Review*, 5(4), 1756–1771. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.505>
- Haynes, A., Gilchrist, H., Oliveira, J. S., & Tiedemann, A. (2021). Using realist evaluation to understand process outcomes in a covid-19-impacted yoga intervention trial: A worked example. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(17). <https://doi.org/10.3390/ijerph18179065>
- Heri Hakim, M. H. R. (2023). Evaluasi kebijakan dinas koperasi terhadap UMKM di kabupaten Semarang: terhadap prinsip-prinsip hukum administrasi Negara. *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1), 224–232. <https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI>
- Husada Putra, A. (2016). Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora. *Jurnal Analisa Sosiologi Oktober*, 5(2), 40–52.
- Ilott, I., Rick, J., Patterson, M., Turgoose, C., & Lacey, A. (2006). What is protocol-based care? A concept analysis. *Journal of Nursing Management*, 14(7), 544–552. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2934.2006.00703.x>
- Jagosh, J., Stott, H., Halls, S., Thomas, R., Liddiard, C., Cupples, M., Cramp, F., Kersten, P., Foster, D., & Walsh, N. E. (2022). Benefits of realist evaluation for rapidly changing health service delivery. *BMJ Open*, 12(7), 1–5. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-060347>
- Khalida, R., & Sofyan Sjaf. (2021). Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Pemilik Umkm Dengan Persepsi Terhadap Karakteristik Sociopreneur. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 5(5), 619–646. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i5.878>
- Latifah, N., Muradi, ;, Umkm, K. K., Kebijakan, E., & Ekonomi, K. (2024). Development of MSMEs by Bank Indonesia in Efforts for Economic Resilience in Tegal Regency in 2022: Policy Program Evaluation. *Neo Respublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 586–605. <https://doi.org/10.52423/neores.v5i2.211>

- Leuwol, N. V., Manuhutu, M. A., & Uktolseja, L. J. (2025). *Cakrawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Available Online at : <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala> Transformasi Digital UMKM Melalui Odoos : Perspektif Sosiologi Agama Pada Praktik Ekonomi Masyarakat Lokal Digital Transformation of MSM*. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i2.4835>
- Mahardhika, I. N., Widanti, N. P. T., Widnyani, I. A. P. S., & Bidul, I. A. S. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Badung. *ECo-Buss*, 7(2), 1229–1239. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1720>
- Mukumbang, F. C., Souza, D. E. De, Eastwood, J. G., Mukumbang, F. C., Souza, D. E. De, & Eastwood, J. G. (2023). *The contributions of scientific realism and critical realism to realist evaluation realist evaluation*. 7430. <https://doi.org/10.1080/14767430.2023.2217052>
- Pauzy, D. M., & Sundari, R. S. (2025). *Evaluating the Internal Marketing of Handicraft MSMEs ' Development Based on the Hexahelix Model*. 13(5), 3517–3528. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3569>
- Prasetyo, A. A., Wijayanto, & Erowati, D. (2024). Evaluasi kebijakan “Tuka-Tuku Purbalingga” sebagai media pemasaran UMKM di Kabupaten Purbalingga. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(2), 359–370. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/43376>
- Rachman, D. F. (2024). Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Lombok Timur Dalam Membina Wirausaha Tahun 2023. *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 695–706. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i4.439>
- Pawson, R., & Tilley, N. (1997). *Realistic evaluation*. SAGE Publications. <https://us.sagepub.com/en-us/nam/realistic-evaluation/book205276>
- Ranmuthugala, G., Cunningham, F. C., Plumb, J. J., Long, J., Georgiou, A., Westbrook, J. I., & Braithwaite, J. (2011). A realist evaluation of the role of communities of practice in changing healthcare practice. *Implementation Science*, 6(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-49>
- Renmans, D., & Castellano Pleguezuelo, V. (2023). Methods in realist evaluation: A mapping review. *Evaluation and Program Planning*, 97, 102209. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2022.102209>
- Rinaldi, F., Maarif, S., Thamrin, S., Studi, P., Maritim, K., Indonesia, U. P., Indonesia, K., Barat, J., & Mikro, U. (2022). *EVALUASI KEBIJAKAN BANTUAN PRESIDEN USAHA MIKRO ( BPUM ) PADA MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI UPAYA PERTAHANAN PENDAHULUAN Upaya penanggulangan pandemi Covid-19 membutuhkan kerjasama dari berbagai kementerian dan institusi . Dalam konteks ini , penanggulang*. 15(1), 125–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14307>
- Santoso, S., & Jati, N. C. K. R. (2020). Analisis Ketepatan Kebijakan Pembinaan Umkm Di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen. *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 33–50. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v2i1.8270>
- Sartyka, M. (2023). Evaluasi Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Usaha di Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Madika: Jurnal Politik Dan Governance*, 3(2), 80–88. <https://doi.org/10.24239/madika.v3i2.1844>
- Suyono, Oksep Adhayanto, R. S. (2024). Evaluasi Program Bantuan Modal Tanpa Bunga Untuk Usaha

Mikro. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 178–187.

Syaifullah, M. M. (2025). EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK : Studi Tentang Gerakan Bela Beli Kulon Progo dan Toko Milik Rakyat dalam Mendorong Perekonomian Lokal di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal JISIPOL*, 9(1), 63–80.  
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1528>  
<https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/download/1528/1248>

#### **PROFIL SINGKAT**

Hendrawan, S.Sos., M.A.P. lahir pada tanggal 1 April 1995. Tempat kelahiran di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Saat ini sedang aktif mengajar sebagai dosen pada jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum di Universitas Sulawesi Barat.